MAKALAH

SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN di INDONESIA

Disusun untuk memenuhi tugas

Mata Kuliah: Ilmu Negara

Dosen Pengampu: Laurensius Arliman SH,MH,MM,MKn

NAMA: RIZKI FEBRIVINANDA PUTRA

E-MAIL: rizkifputra2002@gmail.com

No. BP: 2010003600303

UNIVERSITAS EKASAKTI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul **Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia** ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas **dosen** pada **mata kuliah Ilmu Negara**. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang berjudul **Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia** bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Saya mengucapkan terima kasih kepada **Laurensius Arliman SH,MH,MM,MKn** selaku **dosen mata kuliah Ilmu Negara** yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari, makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Padang, 06 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4-5
1.2. Rumusan	5
1.3. Tujuan.....	5
1.4. Manfaat Pembahasan.....	5
BAB II PEMBAHASAN / ISI	6
2.1.Apa yang dimaksud dengan Pemilu dan Pilkada?	6
2.2.Bagaimana Sejarah Pemilu di Indonesia?	6-8
2.3.Apa Saja Asas-Asas Pemilu dan Pilkada di Indonesia?.....	8-10
2.4.Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Di Indonesia ?	10-13
BAB III PENUTUP.....	14
3.1.Kesimpulan.....	14
3.2.Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15-17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain Gubernur-wakil gubernur, Bupati-wakil bupati, dan Wali kota-wakil wali kota. Pilkada dilakukan pada lingkup tertentu. Pemilu dan pilkada di Indonesia dilaksanakan 5 tahun sekali, jadi untuk menambah wawasan peserta didik proses pemilu dan pilkada diajarkan sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar walaupun mereka belum bisa memilih setidaknya mereka sudah mengetahui dan memahami apa itu pemilu dan pilkada dan nanti setelah mereka sudah berusia 17 tahun mereka sudah memiliki dasar pengetahuan sehingga mereka tinggal mempraktekannya. Adapun syarat-syarat agar bisa mengikuti pemilu dan pilkada ialah warga negara Indonesia, telah berusia 17 tahun ataupun sudah pernah menikah, sehat jasmani dan rohani, dan tidak sedang terkasus pidana. Dalam penyelenggaraan pemilu ada beberapa tahapan yaitu: pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu,

kampanye peserta pemilu serta pemungutan dan penghitungan suara. Untuk lebih jelasnya disini pemakalah akan membahas ,pengertian pemilu dan pilkada, sejarah pemilu dan pilkada di indonesia, asas-asas pemilu dan pilkada, dan penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan Pemilu dan Pilkada
2. Bagaimana sejarah pemilu di indonesia
3. Apa saja asas-asas pemilu dan pilkada di indonesia
4. Bagaimana penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di indonesia

1.3. TUJUAN

1. Untuk mengetahui pengertian pemilu dan pilkada.
2. Untuk mengetahui sejarah pemilu dan pilkada di indonesia.
3. Untuk mengetahui asas-asas pemilu dan pilkada di indonesia
4. Untuk mengetahui cara penyelenggaraan pemilu dan pilkada di indonesia

1.4. MANFAAT PENULISAN

Penulis dapat mengetahui pengertian pemilu dan pilkada, asas-asas pemilu dan pilkada, dan bagaimana penyelenggaraan pemilu dan pilkada di indonesia. Dan dengan adanya penulisan ini menambah wawasan penulis mengenai proses pemilu dan pilkada.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Pemilu Dan Pilkada

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota. Pilkada dilakukan pada lingkup tertentu.

2.2. Sejarah Pemilu Dan Pilkada di Indonesia

1. Pemilu 1955 (Masa Parlemen)

Pemilu di Indonesia pertama kali pada tahun 1955, pada tahun ini pemilu pertama yang diselenggarakan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 tahun, pemilu 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap, pemungutan suara dilakukan 2 kali yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955.

2. Pemilu kedua pada tahun 1971-1997 (Masa Orde Baru)

- a. Pemilu 1971: Merupakan pemilu yang diselenggarakan bangsa indonesia, pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 5 juli 1971 ini untuk memilih anggota DPR.
- b. Pemilu 1977: Pemilu kedua pada masa orde baru yang diselenggarakan pada tanggal 2 mei 1977.
- c. Pemilu 1982: Pemilu ini merupakan pemilu ketiga pada masa orde baru, pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 mei 1982 .
- d. Pemilu 1987: Pemilu ini merupakan pemilu keempat yang diselenggarakan pada tanggal 23 april 1987. Pemilu 1992 pada tanggal 9 juni 1992. Pemilu 1997 pada tanggal 29 mei 1997.

Pemilu pada masa orde baru ini sistemnya sama yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional), dan peserta pemilu yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia.

3. Pemilu 1999-2009 (Masa Orde Reformasi)

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi, pemungutan dilaksanakan pada tanggal 7 juni 1999 secara serentak di seluruh indonesia. Peserta pemilu pada tahun ini diikuti 48 partai politik. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004, dan pemilu pada tahun 2009 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 april 2009.

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakilnya (pilkada) secara langsung, oleh karena itulah sejak tahun 2005 telah diselenggarakan Pilkada secara langsung baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU No 32 tahun 2004.

2.3. Asas-asas Pemilu dan Pilkada di Indonesia

Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu.⁶ Berikut penjelasan asas-asas pemilu:

1. Langsung

Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. Asas ini berkaitan dengan engaged sang “demos” untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, anpa perantara. Hak ini tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak direct, langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.

2. Umum (Algemene, General)

Semua warga Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi.⁹ Umum berarti pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga Negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga yang telah telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

3. Bebas (Vrije, Independent)

Bebas berarti setiap Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya. Didalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Dengan pemilu, kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib. Dengan demikian, semua warga Negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapa pun.

4. Rahasia (Vertrouwelijk, Secret)

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Kerahasiaan ini merupakan rantai dari “makna” kebebasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

5. Jujur (Eerlijk, Honest)

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Adil (Rechtvaardig, Fair)

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Adil memiliki dua makna, yakni: adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Oleh karena itu pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara pemilu. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu.

2.4. Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Di Indonesia

Tujuan diselenggarakannya pemilu dan pilkada adalah sama-sama untuk mewujudkan demokrasi. Namun demikian, ada beberapa perbedaan antara pemilu dan pilkada, pemilu ditujukan untuk memilih wakil rakyat ditingkat pusat dan daerah. Adapun pilkada ditujukan untuk memilih kepala daerah. Pemilu dilaksanakan serentak diseluruh wilayah indonesia, adapun pilkada dilaksanakan hanya dalam lingkup wilayah pemerintahan daerah tertentu saja. Proses pelaksanaan pemilu dan pilkada makanya berbeda, berikut akan dijelaskan proses dan pelaksanaan/penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

1. Penyelenggaraan Pemilu di indonesia

Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU). KPU ada yang berkedudukan di pusat ada yang di daerah. Kpu pusat bertugas mengurus pelaksanaan pemilu di tingkat nasional. Adapun kpu ditingkat daerah bertugas menyelenggarakan pemilihan ditingkat daerah atau disebut pilkada.

Penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam uu no. 22 tahun 2007. Dari undang-undang tersebut diketahui bahwa pemilu di negara kita dilaksanakan dalam tiga tahapan. Tahap pertama dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPRD yang dipilih meliputi para wakil rakyat yang duduk di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, tahap kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, tahap ketiga yaitu pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Pelaksanaan pemilihan wakil rakyat seperti DPR, DPD, DPRD, diatur dalam UU No 10 Tahun 2008

Penyelenggara pemilu meliputi beberapa kegiatan yaitu kegiatan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kampanye peserta pemilu serta pemungutan dan penghitungan suara.

- a. Pendaftaran Pemilih Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas khusus, petugas tersebut mendaftar pemilih dengan mendatangi kediaman calon pemilih. Warga yang

berhak memilih harus memenuhi beberapa persyaratan, berikut beberapa persyaratan agar dapat menjadi pemilih dalam pemilu:

- 1) Pemilih adalah seluruh warga negara indonesia. Warga negara tersebut termasuk yang berada di luar negeri.
- 2) Pemilih telah berusia minimal 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Pemilih yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah atau pernah menikah dapat memiliki hak pilih.
- 3) Sehat jasmani dan rohani, orang yang mengalami gangguan jiwa tidak mempunyai hak pilih.
- 4) Tidak sedang dicabut haknya karena kasus pidana dan berdasarkan putusan pengadilan.

Semua orang yang terdaftar kemudian diumumkan oleh panitia pemungutan suara (PPS). Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang memiliki dan tidak memiliki hak pilih. Apabila ada yang belum terdaftar mereka dapat segera mendaftarkan diri. Para pemilih yang telah terdaftar akan mendapatkan kartu pemilih.

b. Pendaftaran Peserta Pemilu

Pendaftaran juga dilakukan terhadap para peserta pemilu. Peserta pemilu adalah pihak yang akan dipilih oleh rakyat. Peserta pemilu terdiri dari partai politik dan perseorangan. Partai yang dapat menjadi peserta harus memenuhi persyaratan tertentu, berikut persyaratan pemilu:

- 1) Keberadaannya diakui pemerintah sesuai uu no 31 tahun 2002 tentang partai politik.
- 2) Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh jumlah provinsi
- 3) Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh jumlah kabupaten di tiap provinsi

- 4) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap kepengurusan partai.
- 5) Pengurus partai politik harus memiliki kantor tetap.
- 6) Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik ke KPU.

c. Penetapan Peserta Pemilu

Penetapan nomor urut pada politik peserta pemilu dilakukan melalui undian oleh KPU dan dihadiri oleh seluruh partai politik peserta pemilu.

d. Kampanye

Sebelum dilakukan pemungutan suara, partai politik peserta pemilu diberikan kesempatan untuk berkampanye. Pada kampanye pemilu rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Pelaksanaan kampanye pemilu dilaksanakan .

Sejak 3 hari setelah calon peserta ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang, masa tenang yang dimaksud berlangsung 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Materi kampanye pemilu berisi program peserta pemilu, dalam menyampaikan materi kampanye hendaknya dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan mendidik. 15 Sunarso dan Anis Kusumawardani, pendidikan kewarganegaraan untuk SD dan MI kelas VI, (Jakarta: CV.Grahadi, 2008), hlm.22-23

e. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.

2. Penyelenggaraan Pilkada

Pihak yang menyelenggarakan pilkada adalah KPUD provinsi dengan bantuan KPUD kabupaten/kota. Tujuan dilaksanakannya pilkada adalah untuk memilih kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakilnya diatur melalui peraturan pemerintah no 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pilkada hampir sama dengan pemilu. Perbedaan utamanya hanya terletak pada tingkatannya saja. Berikut beberapa kegiatan dalam penyelenggaraan pilkada yaitu:

- 1.** Pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KKPS).
- 2.** Pendaftaran dan penetapan pemilih.
- 3.** Pendaftaran dan penetapan pasangan calon d. Kampanye dan selanjutnya Pelaksanaan pemilihan.

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Ada enam asas pemilu di Indonesia, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuan diselenggarakannya pemilu dan pilkada adalah sama-sama untuk mewujudkan demokrasi. Pemilu dilaksanakan serentak diseluruh wilayah indonesia, adapun pilkada dilaksanakan hanya dalam lingkup wilayah pemerintahan daerah tertentu saja.

3.2. SARAN

Semoga makalah ini bisa menambah wawasan pembaca tentang proses pemilu dan pilkada, dan dengan membaca makalah ini semoga pembaca memahami bagaimana penyelenggaraan di indonesia dan bisa mempraktekkan ketika sudah bisa ikut memilih dan menggunakan hak pilihnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi

Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*,

Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di*

Daerah Perbatasan Indonesia, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai*

Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman, *Justicia Islamica*, Volume

13, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi*

Oleh Pemerintah Kota Padang, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-*

Undangan Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.

Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan*

Ham Perempuan Indonesia, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di*

Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan*

Indonesia

Sebagai Negara Hukum, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights*

In The Area Of Social Conflict, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, *Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020,

<http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Larensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada

Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1,
Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.